

# **Undang-undang No.17 Tahun 2002 tentang Perhitungan Anggaran Negara TA 2000**

November 20th, 2008 5:32 pm

---

## **UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2002**

### **TENTANG**

### **PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2000**

### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

### **PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang: a. bahwa Perhitungan Anggaran Negara sebagai tahap akhir dari rangkaian siklus anggaran negara merupakan pertanggungjawaban Pemerintah sesuai konstitusi atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Undang-undang tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 2000;

Mengingat: 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (2), Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 23E Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Perbendaharaan Indonesia (Indische Compta-biliteitswet Stbl. Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860);

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3010);

4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3944) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4047);

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan: **UNDANG-UNDANG TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2000.**

**Pasal 1**

(1) Realisasi Anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 2000 diperoleh dari sumber-sumber :

a. Penerimaan Perpajakan;

b. Penerimaan Negara Bukan Pajak;

c. Penerimaan Hibah.

(2) Realisasi Penerimaan Perpajakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a adalah sebesar Rp115.912.553.967.084,00 (seratus lima belas triliun sembilan ratus dua belas miliar lima ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu delapan puluh empat rupiah).

(3) Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b adalah sebesar Rp 89.421.950.235.975,00 (delapan puluh sembilan triliun empat ratus dua puluh satu miliar sembilan ratus lima puluh dua ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah).

(4) Realisasi Penerimaan Hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c adalah sebesar Rp 0,00 (nihil).

(5) Jumlah Realisasi Anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 2000 sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) adalah sebesar Rp205.334.504.203.059,00 (dua ratus lima triliun tiga ratus tiga puluh empat miliar lima ratus empat juta dua ratus tiga ribu lima puluh sembilan rupiah).

## Pasal2

(1) RealisasiPenerimaan Perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari :

a.Realisasi Penerimaan Pajak Dalam Negeri;

b.Realisasi Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional.

(2) Realisasi Penerimaan Pajak Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a adalah sebesar Rp108.884.226.302.945,00 (seratus delapan triliun delapan ratus delapan puluh empat miliar dua ratus dua puluh enam juta tiga ratus dua ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah).

(3) Realisasi Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b adalah sebesar Rp7.028.327.664.139,00 (tujuh triliun dua puluh delapan miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta enam ratus enam puluh empat ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah).

(4) Jumlah Realisasi Penerimaan Perpajakan Tahun Anggaran 2000 sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) adalah sebesar Rp115.912.553.967.084,00 (seratus lima belas triliun sembilan ratus dua belas miliar lima ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu delapan puluh empat rupiah).

(5)Rincian Realisasi Penerimaan Perpajakan Tahun Anggaran 2000 sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dicantumkan dalam penjelasan ayat ini.

## Pasal3

(1) Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) terdiri dari :

a.Realisasi Penerimaan Sumber Daya Alam;

b.Realisasi Bagian Pemerintah atas Laba Badan Usaha Milik Negara;

c.Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya.

(2) Realisasi Penerimaan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a adalah sebesar Rp 76.290.055.913.055,00 (tujuh puluh enam triliun dua ratus sembilan puluh miliar lima puluh lima juta sembilan ratus tiga belas ribu lima puluh lima rupiah).

(3) Realisasi Bagian Pemerintah atas Laba Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b adalah sebesar Rp4.017.807.791.740,00 (empat triliun tujuh belas miliar delapan ratus tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh rupiah).

(4) Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya sebagai-mana dimaksud dalam ayat (1) huruf c adalah sebesarRp 9.114.086.531.180,00 (sembilan triliun seratus empat belas miliar delapan puluh enam juta lima ratus tiga puluh satu ribu seratus delapan puluh rupiah).

(5) Jumlah Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun Anggaran 2000 sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) adalah sebesar Rp 89.421.950.235.975,00 (delapan puluh sembilan triliun empat ratus dua puluh satu miliar sembilan ratus lima puluh juta dua ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah).

(6) Rincian Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun Anggaran 2000 sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dicantumkan dalam penjelasan ayat ini.

## Pasal4

(1) Realisasi Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 2000 terdiri dari :

a.Pengeluaran Rutin;

b.Pengeluaran Pembangunan.

(2) Realisasi Pengeluaran Rutin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a adalah sebesar Rp 178.587.403.644.090,00 (seratus tujuh puluh delapan triliun lima ratus delapan puluh tujuh miliar empat ratus tiga juta enam ratus empat puluh empat ribu sembilan puluh rupiah).

(3) Realisasi Pengeluaran Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b adalah sebesar Rp 42.879.335.101.297,00 (empat puluh dua triliun delapan ratus tujuh puluh sembilan miliar tiga ratus tiga puluh lima juta seratus satu ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah).

(4) Jumlah Realisasi Pengeluaran Rutin Tahun Anggaran 2000 dan Realisasi Pengeluaran Pembangunan Tahun Anggaran 2000 sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) adalah sebesar Rp221.466.738.745.387,00 (dua ratus dua puluh satu triliun empat ratus enam puluh miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah).

(5) Rincian Realisasi Pengeluaran Rutin dan Realisasi Pengeluaran Pembangunan Tahun Anggaran 2000 sebagaimana dimaksud dalam ayat(4) ke dalam Sektor dan Subsektor dicantumkan dalam penjelasan ayat ini.

#### Pasal5

(1) Dengan jumlah realisasi Anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran2000sebesarRp205.334.504.203.059,00(dua ratus lima triliun tiga ratus tiga puluh empat miliar lima ratus empat juta dua ratus tiga ribu lima puluh sembilan rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (5), lebih kecil dari jumlah realisasi Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 2000 sebesar Rp221.466.738.745.387,00 (dua ratus dua puluh satu triliun empat ratus enam puluh enam miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), maka dalam Tahun Anggaran 2000 terdapat defisit anggaran sebesar Rp16.132.234.542.328,00 (enam belas triliun seratus tiga puluh dua miliar dua ratus tiga puluh empat juta lima ratus empat puluh dua ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah), yang dibiayai dari Pembiayaan Defisit Anggaran.

(2) Realisasi Pembiayaan Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2000 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperoleh dari sumber-sumber :

- a. Pembiayaan Dalam Negeri sebesar Rp18.900.000.000.000,00 (delapan belas triliun sembilan ratus miliar rupiah);
- b. Pembiayaan Luar Negeri Bersih sebesar Rp10.195.669.541.708,00 (sepuluh triliun seratus sembilan puluh lima miliar enam ratus enam puluh sembilan juta lima ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus delapan rupiah).

(3) Rincian Realisasi Pembiayaan Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2000 sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dicantumkan dalam penjelasan ayat ini.

#### Pasal 6

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Anggaran 2000 adalah sebesar Rp12.963.434.999.380,00 (dua belas triliun sembilan ratus enam puluh tigamiliarempatratustigapuluhempat juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) yang akan menambah Sisa Anggaran Lebih tahun-tahun anggaran sebelumnya, dan dapat dipergunakan sebagai dana talangan pelaksanaan anggaran tahun-tahun berikutnya.

#### Pasal7

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Juni 2002  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal28 Juni 2002  
SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2002 NOMOR69

PENJELASAN  
ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR17TAHUN 2002  
TENTANG

PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2000

UMUM

Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 2000 setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk memenuhi kewajiban melaksanakan perhitungan dan pertanggungjawaban Pemerintah atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2000, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2000.

Dalam Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 2000 tersebut terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran sebesar Rp12.963.434.999.380,00 (dua belas triliun sembilan ratus enam puluh tiga miliar empat ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh rupiah).

Sisa Anggaran Lebih kumulatif sampai dengan Tahun Anggaran 1999/2000 sebesar Rp14.692.555.080.805,00 (empat belas triliun enam ratus sembilan puluh dua miliar lima ratus lima puluh lima juta delapan puluh ribu delapan ratus lima rupiah).

Sisa Anggaran Lebih kumulatif sampai dengan Tahun Anggaran 2000 menjadi sebesar Rp27.655.990.080.185,00 (dua puluh tujuh triliun enam ratus lima puluh lima miliar sembilan ratus sembilan puluh juta delapan puluh ribu seratus delapan puluh lima rupiah). Jumlah Sisa Anggaran Lebih kumulatif tersebut termasuk Cadangan Anggaran Pembangunan (CAP) sebesar Rp1.730.000.000.000,00 (satu triliun tujuh ratus tiga puluh miliar rupiah).

## PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

#### Ayat (1)

Cukup jelas

#### Ayat (2)

Cukup jelas

#### Ayat (3)

Cukup jelas

#### Ayat (4)

Cukup jelas

#### Ayat (5)

Penerimaan Perpajakan sebesar Rp115.912.553.967.084,00 yang terdiri dari:

a. Pajak dalam negeri	<b>Rp108.884.226.302.945,00</b>
0110 Pajak penghasilan Nonmigas	<b>Rp38.421.473.603.095,00</b>
0120 Pajak penghasilan migas	<b>Rp18.651.550.493.621,00</b>
0130 Pajak pertambahan nilai barang dan jasa, dan pajak penjualan atas barang mewah (PPN dan PPnBM)	<b>Rp 35.231.786.984.010,00</b>
0140 Pajak bumi dan bangunan (PBB)	<b>Rp 3.525.326.197.974,00</b>
0150 Bea perolehan atas tanah dan bangunan (BPHTB)	<b>Rp 930.787.751.768,00</b>
0160 Cukai	<b>Rp11.286.606.555.345,00</b>
0170 Pajak lainnya (Bea meterai)	<b>Rp 836.694.717.132,00</b>
b. Pajak perdagangan internasional	<b>Rp 7.028.327.664.139,00</b>
0210 Bea masuk	<b>Rp 6.697.068.981.518,00</b>
0230 Pungutan (pajak) ekspor	<b>Rp 331.258.682.621,00</b>

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp89.421.950.235.975,00 yang terdiri dari :

a.Penerimaan sumber daya alam	<b>Rp76.290.055.913.055,00</b>
0310Penerimaan minyak bumi	<b>Rp50.953.017.680.978,00</b>
0320Penerimaan gas alam	<b>Rp15.707.944.490.800,00</b>
0330Penerimaan pertambangan umum	<b>Rp 856.869.752.730,00</b>
0340Penerimaan kehutanan	<b>Rp 8.719.284.333.817,00</b>
0350Penerimaan perikanan	<b>Rp 52.939.654.730,00</b>
b.Bagian Pemerintah atas laba badan usaha milik Negara	<b>Rp4.017.807.791.740,00</b>
0410Bagian laba dari BUMN	<b>Rp 4.017.807.791.740,00</b>
c.Penerimaan Negara Bukan Pajak lainnya	<b>Rp 9.114.086.531.180,00</b>
0510Penjualan hasil produksi, sitaan	<b>Rp 35.720.453.616,00</b>
0511Penjualan hasil pertanian, per-kebunan	<b>Rp 1.716.577.296,00</b>
0512Penjualan hasil peternakan	<b>Rp 2.000.612.373,00</b>
0513Penjualan hasil perikanan	<b>Rp 946.493.808,00</b>
0514Penjualan hasil sitaan	<b>Rp 11.968.742.277,00</b>
0515Penjualan obat-obatan dan hasil farmasi lainnya	<b>Rp 183.501.009,00</b>
0516Penjualan penerbitan, film, dan hasil cetakan lainnya	<b>Rp 197.869.948,00</b>
0517Penjualan dokumen-dokumen pelelangan	<b>Rp 4.033.702.730,00</b>
0519Penjualan lainnya	<b>Rp 14.672.954.175,00</b>

0520	Penjualan aset tetap	<b>Rp 31.651.742.549,00</b>
0521	Penjualan rumah, gedung, bangunan, dan tanah	<b>Rp 5.249.863.976,00</b>
0522	Penjualan kendaraan bermotor	<b>Rp 601.075.954,00</b>
0523	Penjualan sewa beli	<b>Rp 18.413.519.233,00</b>
0529	Penjualan aset lainnya yang berlebih, rusak, dihapuskan	<b>Rp 7.387.283.386,00</b>
0530	Pendapatan sewa	<b>Rp 9.691.207.886,00</b>
0531	Sewa rumah dinas, rumah negeri	<b>Rp 3.755.932.445,00</b>
0532	Sewa gedung, bangunan, gudang	<b>Rp 3.507.954.329,00</b>
0533	Sewa benda-benda bergerak	<b>Rp 1.663.376.092,00</b>
0539	Sewa benda-benda tak bergerak lainnya	<b>Rp 763.945.020,00</b>
0540	Pendapatan jasa I	<b>Rp 460.738.215.475,00</b>
0541	Pendapatan rumah sakit dan instansi kesehatan lainnya	<b>Rp 37.353.191.541,00</b>
0542	Pendapatan tempat hiburan, taman, museum	<b>Rp 362.710.465,00</b>
0543	Pendapatan surat keterangan, visa, paspor, dan SIM, STNK, BPKB	<b>Rp 208.609.744.886,00</b>
0544	Pendapatan jasa pertanahan	<b>Rp 10.592.429.472,00</b>
0545	Pendapatan hak dan perijinan	<b>Rp 164.031.437.689,00</b>
0546	Pendapatan sensor, karantina, pengawasan, pemeriksaan	<b>Rp 7.647.798.492,00</b>
0547	Pendapatan jasa tenaga, jasa pekerjaan	<b>Rp 6.631.993.783,00</b>
0548	Pendapatan jasa Kantor Urusan Agama	<b>Rp 3.468.013.155,00</b>
0549	Pendapatan jasa bandar udara dan pelabuhan	<b>Rp 22.040.895.992,00</b>
0550	Pendapatan jasa II	<b>Rp 853.922.833.398,00</b>
0551	Pendapatan jasa lembaga keuangan (jasa giro)	<b>Rp 70.087.715.652,00</b>
0552	Pendapatan iuran hasil hutan, hasil laut, royalti dan denda	<b>Rp 307.501.493.126,00</b>
0553	Pendapatan iuran lelang untuk fakir miskin	<b>Rp 10.189.941.146,00</b>
0554	Pendapatan jasa Kantor Catatan Sipil	<b>Rp 5.045.402.018,00</b>
0555	Pendapatan biaya penagihan pajak-pajak negara dengan surat paksa	<b>Rp 2.236.312.541,00</b>
0556	Pendapatan uang pewarganegara-an	<b>Rp 6.975.294.693,00</b>
0557	Pendapatan bea lelang	<b>Rp 132.792.250.618,00</b>

0558Pendapatan biaya pengurusan piutang negara dan lelang negara	<b>Rp42.219.640.368,00</b>
0559Pendapatan jasa lainnya	<b>Rp276.874.783.236,00</b>
0560Pendapatan rutin dari luar negeri	<b>Rp87.404.370.945,00</b>
0580Pendapatan penjualan, sewa dan jasa swadana	<b>Rp621.629.727.512,00</b>
0581Pendapatan penjualan swadana	<b>Rp 5.496.146.964,00</b>
0582Pendapatan sewa swadana	<b>Rp 2.984.750.516,00</b>
0583Pendapatan jasa swadana	<b>Rp613.148.830.032,00</b>
0610Pendapatan kejaksaan dan peradilan	<b>Rp24.750.756.622,00</b>
0611Legalisasi tanda tangan	<b>Rp 122.707.964,00</b>
0612Pengesahan surat di bawah tangan	<b>Rp 14.038.450,00</b>
0613Uang meja (leges) dan upah pada panitera badan pengadilan	<b>Rp 764.937.469,00</b>
0614Hasil denda, denda tilang dan sebagainya	<b>Rp11.637.328.085,00</b>
0615Ongkos perkara	<b>Rp 991.040.729,00</b>
0619Penerimaan kejaksaan dan peradilan lainnya	<b>Rp11.220.703.925,00</b>
0710Pendapatan pendidikan	<b>Rp7.971.369.764,00</b>
0711Uang pendidikan	<b>Rp3.683.969.372,00</b>
0712Uang ujian masuk, kenaikan tingkat, dan akhir pendidikan	<b>Rp 3.706.365.559,00</b>
0713Uang ujian untuk menjalankan praktek	<b>Rp 57.493.000,00</b>
0719Pendapatan pendidikan lainnya	<b>Rp 523.541.833,00</b>
0780Pendapatan pendidikan swadana	<b>Rp604.755.627.475,00</b>
0781Pendapatan pendidikan swadana	<b>Rp604.755.627.475,00</b>
0810Pendapatan kembali belanja tahun anggaran berjalan	<b>Rp179.757.894.291,00</b>
0811Penerimaan kembali belanja pegawai pusat	<b>Rp 85.644.933.166,00</b>
0812Penerimaan kembali belanja daerah otonom	<b>Rp 21.756.648.972,00</b>
0813Penerimaan kembali belanja pensiun	<b>Rp 50.585.706.785,00</b>
0814Penerimaan kembali belanja rutin lainnya	<b>Rp 10.651.133.219,00</b>
0815Penerimaan kembali belanja pembangunan rupiah murni	<b>Rp 11.119.472.149,00</b>
0820Pendapatan dari penerimaan kembali belanja tahun	<b>Rp599.335.922.711,00</b>

anggaran yang lalu	
0821Penerimaan kembali belanja pegawai pusat	<b>Rp 67.334.191.753,00</b>
0822Penerimaan kembali belanja pegawai otonom	<b>Rp3.014.469.225,00</b>
0823Penerimaan kembali belanja pensiun	<b>Rp 5.952.669.476,00</b>
0824Penerimaan kembali belanja rutin lainnya	<b>Rp236.559.273.414,00</b>
0825Penerimaan kembali belanja pembangunan rupiah murni	<b>Rp286.475.318.843,00</b>
0840Pendapatan pelunasan piutang	<b>Rp4.989.842.187.810,00</b>
0841Pendapatan pelunasan piutang	<b>Rp 4.989.842.187.810,00</b>
0880Pendapatan lain-lain swadana	<b>Rp10.238.344.589,00</b>
0881Pendapatan lain-lain swadana	<b>Rp 10.238.344.589,00</b>
0890Pendapatan lain-lain	<b>Rp596.675.876.537,00</b>
0891Penerimaan kembali persekot, uang muka gaji	<b>Rp 2.227.858.755,00</b>
0892Penerimaan denda keterlam-batan penyelesaian pekerjaan	<b>Rp16.323.365.048,00</b>
0893Penerimaan kembali ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh negara	<b>Rp 6.201.984.493,00</b>
0894Penerimaan kembali perhitungan sisa lebih subsidi gaji PNS daerah otonom berdasarkan SPM nihil KPKN	<b>Rp54.924.339,00</b>
0895Pendapatan atas denda administrasi BPHTB	-----
0899Pendapatan anggaran lainnya	<b>Rp571.867.743.902,00</b>

#### Pasal 4

##### Ayat (1)

Cukup jelas

##### Ayat (2)

Cukup jelas

##### Ayat (3)

Cukup jelas

##### Ayat (4)

Cukup jelas

##### Ayat (5)

Pengeluaran rutin sebesar Rp178.587.403.644.090,00 terdiri dari :

01Sektor Industri Rp82.999.609.292,00

01.1Subsektor IndustriRp82.999.609.292,00

02Sektor Pertanian dan Kehutanan Rp819.564.808.952,00

02.1Subsektor Pertanian Rp251.335.711.110,00

02.2Subsektor Kehutanan Rp568.229.097.842,00



03Sektor PengairanRp26.183.455.264,00  
03.1Subsektor Pengembangan  
Sumber Daya Air---  
03.2Subsektor Irigasi Rp26.183.455.264,00

04Sektor Tenaga KerjaRp313.459.497.009,00  
04.1Subsektor Tenaga Kerja Rp313.459.497.009,00

05Sektor Perdagangan, PengembanganUSAHA  
NASIONAL, KEUANGAN DAN Koperasi Rp134.924.474.286.930,00  
05.1Subsektor Perdagangan Dalam Negeri Rp 80.276.768.883,00  
05.2Subsektor Perdagangan Luar Negeri Rp 54.064.625.714,00  
05.3Subsektor Pengembangan Usaha Nasional ---  
05.4Subsektor Keuangan Rp134.764.872.315.849,00  
05.5Subsektor Koperasi dan Pengusaha Kecil Rp25.260.576.484,00

06Sektor Transportasi, Meteorologi DAN Geofisika Rp336.705.103.355,00  
06.1Subsektor Prasarana JalanRp 17.235.345.259,00  
06.2Subsektor Transportasi Darat Rp 29.390.770.362,00  
06.3Subsektor Transportasi LautRp174.679.865.922,00  
06.4Subsektor Transportasi UdaraRp 61.033.936.662,00  
06.5Subsektor Meteorologi, Geofisika,  
Pencarian dan Penyelamatan(SAR) Rp 54.365.185.150,00

07Sektor Pertambangan dan EnergiRp337.156.838.428,00  
07.1Subsektor Pertambangan Rp331.007.623.985,00  
07.2Subsektor Energi Rp6.149.214.443,00

08Sektor Pariwisata, Pos dan TelekomunikasiRp132.533.603.747,00  
08.1Subsektor Pariwisata Rp53.205.992.268,00  
08.2Subsektor Pos dan Telekomunikasi Rp79.327.611.479,00

09Sektor Pembangunan Sarah  
dan TraNsmigrasi Rp 16.105.800.068.662,00  
09.1Subsektor Pembangunan Daerah Rp 16.090.648.923.114,00  
09.2Subsektor Transmigrasi dan Pemukiman  
Perambah HutanRp15.151.145.548,00

10Sektor Lingkungan Hidup dan Tata Ruang Rp267.234.076.637,00  
10.1Subsektor Lingkungan Hidup Rp10.876.054.683,00  
10.2Subsektor Tata Ruang Rp256.358.021.954,00

11Sektor Pendidikan, KebudayaanNasional,  
Kepercayaan Terhadap Tuhan YANG  
MAHA Esa, Pemuda dan Olah ragaRp 6.987.253.174.111,00

11.1Subsektor Pendidikan Rp6.504.897.254.250,00  
11.2 Subsektor Pendidikan Luar Sekolah dan  
Kedinasan Rp375.343.037.243,00  
11.3Subsektor Kebudayaan Nasional dan  
Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha EsaRp97.632.075.057,00  
11.4Subsektor Pemuda dan Olah Raga Rp9.380.807.561,00

12Sektor Kependudukan dan KELUARGASejahteraRp426.425.433.435,00  
12.1Subsektor Kependudukan dan  
Keluarga Berencana Rp426.425.433.435,00

13Sektor Kesejahteraan Sosial, KESEHATAN,  
PERANAN WANITA, Anak dan RemajaRp680.876.923.001,00  
13.1Subsektor Kesejahteraan SosialRp22.873.159.401,00  
13.2Subsektor KesehatanRp658.003.763.600,00  
13.3Subsektor Peranan Wanita, Anak dan Remaja---

14Sektor Perumahan dan Permukiman Rp23.616.506.009,00  
14.1Subsektor Perumahan dan PermukimanRp23.181.694.155,00  
14.2Subsektor Penataan Kota dan BangunanRp434.811.854,00

15Sektor AgamaRp1.151.755.322.309,00

15.1Subsektor Pelayanan Kehidupan BeragamaRp261.492.299.429,00  
15.2Subsektor Pembinaan Pendidikan AgamaRp890.263.022.880,00

16Sektor Ilmu Pengetahuan dan TeknologiRp435.256.791.450,00

16.1Subsektor Teknik Produksi dan Teknologi---

16.2Subsektor Ilmu Pengetahuan Terapan dan  
Dasar Rp266.698.960.263,00

16.3 Subsektor Kelembagaan Prasarana dan Sarana Ilmu Pengetahuan dan TeknologiRp37.918.459.499,00

16.4Subsektor Kelautan---

16.5Subsektor KedirgantaraanRp1.843.320.476,00

16.6Subsektor Sistem Informasi dan StatistikRp128.796.051.212,00

17Sektor HukumRp886.156.761.240,00

17.1Subsektor Pembinaan Hukum NasionalRp741.085.453.921,00

17.2Subsektor Pembinaan Aparatur HukumRp145.071.307.319,00

17.3Subsektor Sarana dan Prasarana Hukum ---

18Sektor Aparatur Negara dan PengawasanRp4.105.151.965.937,00

18.1Subsektor Aparatur NegaraRp3.799.344.063.390,00

18.2Subsektor Pendayagunaan Sistem dan  
Pelaksanaan PengawasanRp 305.807.902.547,00

19Sektor Politik, Hubungan Luar NEGERI,

Penerangan, Komunikasi dan Media MassaRp1.631.877.071.525,00

19.1Subsektor PolitikRp165.141.948.629,00

19.2Subsektor Hubungan Luar NegeriRp1.404.869.832.276,00

19.3Subsektor Penerangan, Komunikasi dan  
Media MassaRp61.865.290.620,00

20Sektor Pertahanan dan KeamananRp 8.912.922.346.797,00

20.1Subsektor Rakyat Terlatih dan Perlindungan  
Masyarakat---

20.2Subsektor Tentara Nasional IndonesiaRp 5.873.153.805.594,00

20.3Subsektor KepolisianRp 2.983.793.274.203,00

20.4Subsektor PendukungRp55.975.267.000,00

Pengeluaran pembangunan sebesar Rp42.879.335.101.297,00 terdiri dari pengeluaran pembangunan yang dibiayai rupiah murni (Pembiayaan Rupiah) dan pengeluaran pembangunan yang dibiayai melalui pinjaman proyek (Pembiayaan Proyek).

a. Pengeluaran Pembangunan Pembiayaan Rupiah sebesar Rp25.909.710.201.956,00 terdiri dari :

01Sektor Industri Rp41.981.171.762,00

01.1Subsektor IndustriRp41.981.171.762,00

02Sektor Pertanian dan Kehutanan Rp497.311.358.708,00

02.1Subsektor PertanianRp489.631.813.609,00

02.2Subsektor KehutananRp7.679.545.099,00

03Sektor PengairanRp670.189.728.713,00

03.1Subsektor Pengembangan Sumber  
Daya AirRp269.972.834.384,00

03.2Subsektor IrigasiRp400.216.894.329,00

04Sektor Tenaga KerjaRp75.313.109.946,00

04.1Subsektor Tenaga KerjaRp75.313.109.946,00

05Sektor Perdagangan, Pengembangan

USAHA NASIONAL, KEUANGAN DAN KoperasiRp261.631.171.357,00

05.1Subsektor Perdagangan Dalam NegeriRp10.355.112.602,00

05.2Subsektor Perdagangan Luar Negeri Rp36.064.010.651,00

05.3Subsektor Pengembangan Usaha  
NasionalRp61.392.562.578,00

05.4Subsektor KeuanganRp28.311.746.950,00

05.5Subsektor Koperasi dan Pengusaha  
KecilRp125.507.738.576,00

06Sektor Transportasi, Meteorologi

DAN GeofisikaRp927.483.880.248,00

06.1Subsektor Prasarana JalanRp703.749.975.101,00

06.2Subsektor Transportasi DaratRp105.893.056.939,00  
06.3Subsektor Transportasi LautRp41.352.803.628,00  
06.4Subsektor Transportasi UdaraRp70.755.817.319,00  
06.5Subsektor Meteorologi, Geofisika,  
Pencarian dan Penyelamatan(SAR)Rp5.732.227.261,00

07Sektor Pertambangan dan EnergiRp382.024.593.421,00  
07.1Subsektor PertambanganRp36.345.719.851,00  
07.2Subsektor EnergiRp345.678.873.570,00

08Sektor Pariwisata, Pos dan TelekomunikasiRp30.391.598.819,00  
08.1Subsektor PariwisataRp23.996.760.557,00  
08.2Subsektor Pos dan TelekomunikasiRp6.394.838.262,00

09Sektor Pembangunan Daerah dan TraNsmigrasiRp17.029.275.904.473,00  
09.1Subsektor Pembangunan Daerah Rp16.678.740.246.508,00  
09.2Subsektor Transmigrasi dan  
Pemukiman Perambah HutanRp50.535.657.965,00

10Sektor Lingkungan Hidup dan Tata RAUNG Rp98.568.954.947,00  
10.1Subsektor Lingkungan HidupRp62.095.924.525,00  
10.2Subsektor Tata RuangRp36.473.030.422,00

11Sektor Pendidikan, KebudayaanNASIONAL,  
Kepercayaan Terhadap Tuhan YANG MAHA  
Esa, Pemuda dan Olah ragaRp2.410.637.636.685,00  
11.1Subsektor PendidikanRp2.150.593.899.279,00  
11.2Subsektor Pendidikan Luar Sekolah  
dan KedinasanRp190.344.041.472,00  
11.3Subsektor Kebudayaan Nasional dan  
Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang  
Maha EsaRp40.334.816.419,00  
11.4Subsektor Pemuda dan Olah RagaRp29.364.879.515,00

12Sektor Kependudukan dan Keluarga SejahteraRp 148.547.388.764,00  
12.1Subsektor Kependudukan dan Keluarga  
BerencanaRp148.547.388.764,00

13Sektor Kesejahteraan Sosial, KESEHATAN,  
PERANAN WANITA, Anak dan Remaja Rp1.134.544.631.772,00  
13.1Subsektor Kesejahteraan SosialRp140.965.805.855,00  
13.2Subsektor KesehatanRp642.191.258.357,00  
13.3Subsektor Peranan Wanita, Anak  
dan RemajaRp351.387.567.560,00

14Sektor Perumahan dan PermukimanRp232.193.106.890,00  
14.1Subsektor Perumahan dan PermukimanRp226.155.938.436,00  
14.2Subsektor Penataan Kota dan BangunanRp6.037.168.454,00

15Sektor AgamaRp42.148.866.676,00  
15.1Subsektor Pelayanan Kehidupan  
BeragamaRp20.434.696.093,00  
15.2Subsektor Pembinaan Pendidikan AgamaRp21.714.170.583,00

16Sektor Ilmu Pengetahuan dan TeknologiRp368.290.232.634,00  
16.1Subsektor Teknik Produksi dan TeknologiRp92.393.669.681,00  
16.2Subsektor Ilmu Pengetahuan Terapan dan  
Dasar Rp28.312.227.192,00  
16.3Subsektor Kelembagaan Prasarana dan  
Sarana Ilmu Pengetahuan dan TeknologiRp42.382.992.615,00  
16.4Subsektor KelautanRp31.203.593.931,00  
16.5Subsektor KedirgantaraanRp24.785.625.460,00  
16.6Subsektor Sistem Informasi dan StatistikRp149.212.123.755,00

17Sektor HukumRp123.283.533.889,00  
17.1Subsektor Pembinaan Hukum NasionalRp12.755.363.587,00  
17.2Subsektor Pembinaan Aparatur HukumRp31.273.671.807,00  
17.3Subsektor Sarana dan Prasarana Hukum Rp79.254.498.495,00

18Sektor Aparatur Negara dan PengawasanRp443.902.059.808,00  
18.1Subsektor Aparatur NegaraRp393.454.418.654,00

18.2Subsektor Pendayagunaan Sistem dan  
Pelaksanaan PengawasanRp50.447.641.154,00

19Sektor Politik, Hubungan Luar Negeri, Penerangan,  
Komunikasi dan Media MassaRp38.648.257.494,00

19.1Subsektor PolitikRp1.720.576.389,00

19.2Subsektor Hubungan Luar NegeriRp9.837.228.134,00

19.3Subsektor Penerangan, Komunikasi  
dan Media MassaRp27.090.452.971,00

20Sektor Pertahanan dan KeamananRp953.343.014.950,00

20.1Subsektor Rakyat Terlatih dan  
Perlindungan MasyarakatRp625.530.635.965,00

20.2Subsektor TNI Rp197.068.860.484,00

20.3Subsektor KepolisianRp106.676.888.076,00

20.4Subsektor PendukungRp24.066.630.425,00

b. Pengeluaran Pembangunan Pembiayaan Proyek sebesar Rp 16.969.624.899.341,00 terdiri dari :

01Sektor Industri Rp89.324.659.182,00 01.1Subsektor IndustriRp89.324.659.182,00

02Sektor Pertanian dan Kehutanan Rp1.451.354.654.967,00

02.1Subsektor PertanianRp1.406.754.251.441,00

02.2Subsektor KehutananRp44.600.403.526,00

03Sektor PengairanRp1.468.933.787.710,00

03.1Subsektor Pengembangan Sumber

Daya AirRp1.131.317.802.470,00

03.2Subsektor IrigasiRp337.615.985.240,00

04Sektor Tenaga KerjaRp70.553.052.911,00

04.1Subsektor Tenaga KerjaRp70.553.052.911,00

05Sektor Perdagangan, Pengembangan USAHA

NASIONAL, KEUANGAN DAN KoperasiRp1.026.432.130.485,00

05.1Subsektor Perdagangan Dalam NegeriRp134.007.638.692,00

05.2Subsektor Perdagangan Luar NegeriRp45.076.973,00

05.3Subsektor Pengembangan Usaha

NasionalRp5.866.919.635,00

05.4Subsektor KeuanganRp785.190.374.094,00

05.5Subsektor Koperasi dan Pengusaha

KecilRp101.322.121.091,00

06Sektor Transportasi, Meteorologi DAN GeofisikaRp2.569.177.051.251,00

06.1Subsektor Prasarana JalanRp2.122.496.949.654,00

06.2Subsektor Transportasi DaratRp322.144.932.732,00

06.3Subsektor Transportasi LautRp33.782.475.792,00

06.4Subsektor Transportasi UdaraRp90.752.693.073,00

06.5Subsektor Meteorologi, Geofisika,

Pencarian dan Penyelamatan(SAR)---

07Sektor Pertambangan dan EnergiRp891.874.021.980,00

07.1Subsektor Pertambangan--

07.2Subsektor EnergiRp891.874.021.980,00

08Sektor Pariwisata, Pos dan TelekomunikasiRp368.073.940.746,00

08.1Subsektor Pariwisata--

08.2Subsektor Pos dan TelekomunikasiRp368.073.940.746,00

09Sektor Pembangunan Daerah dan TransmigrasiRp1.963.178.252.309,00

09.1Subsektor Pembangunan Daerah Rp1.963.178.252.309,00

09.2Subsektor Transmigrasi dan Pemukiman

Perambah Hutan---

10Sektor Lingkungan Hidup dan Tata RUANGRp487.491.940.334,00

10.1Subsektor Lingkungan HidupRp398.194.619.765,00

10.2Subsektor Tata RuangRp89.297.320.569,00

11 Sektor Pendidikan, Kebudayaan NASIONAL,  
Kepercayaan Terhadap Tuhan YANG MAHA Esa,  
Pemuda dan Olah raga Rp2.183.348.583.896,00  
11.1 Subsektor Pendidikan Rp2.128.179.782.001,00  
11.2 Subsektor Pendidikan Luar Sekolah  
dan Kedinasan Rp52.829.411.676,00  
11.3 Subsektor Kebudayaan Nasional dan  
Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang  
Maha Esa---  
11.4 Subsektor Pemuda dan Olah Raga Rp2.339.390.219,00

12 Sektor Kependudukan dan Keluarga Sejahtera Rp115.875.190.021,00  
12.1 Subsektor Kependudukan dan Keluarga  
Berencana Rp115.875.190.021,00

13 Sektor Kesejahteraan Sosial, KESEHATAN,  
PERANAN WANITA, Anak dan Remaja Rp 1.307.517.392.945,00

13.1 Subsektor Kesejahteraan Sosial Rp87.659.915.065,00  
13.2 Subsektor Kesehatan Rp 1.219.857.477.880,00  
13.3 Subsektor Peranan Wanita, Anak  
dan Remaja---

14 Sektor Perumahan dan Permukiman Rp 2.800.780.410.227,00  
14.1 Subsektor Perumahan dan Permukiman Rp 2.799.099.558.779,00  
14.2 Subsektor Penataan Kota dan Bangunan Rp1.680.851.448,00

15 Sektor Agama Rp28.236.201.697,00  
15.1 Subsektor Pelayanan Kehidupan  
Beragama Rp28.236.201.697,00  
15.2 Subsektor Pembinaan Pendidikan  
Agama---

16 Sektor Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Rp42.929.743.725,00  
16.1 Subsektor Teknik Produksi dan Teknologi Rp23.136.973.288,00  
16.2 Subsektor Ilmu Pengetahuan Terapan  
dan Dasar---  
16.3 Subsektor Kelembagaan Prasarana dan  
Sarana Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Rp15.114.006.244,00  
16.4 Subsektor Kelautan Rp 201.898.800,00  
16.5 Subsektor Kedirgantaraan---  
16.6 Subsektor Sistem Informasi dan Statistik Rp4.476.865.393,00

17 Sektor Hukum---  
17.1 Subsektor Pembinaan Hukum Nasional---  
17.2 Subsektor Pembinaan Aparatur Hukum---  
17.3 Subsektor Sarana dan Prasarana Hukum ---

18 Sektor Aparatur Negara dan Pengawasan Rp47.585.687.048,00  
18.1 Subsektor Aparatur Negara Rp47.585.687.048,00  
18.2 Subsektor Pendayagunaan Sistem dan  
Pelaksanaan Pengawasan---

19 Sektor Politik, Hubungan Luar Negeri, Penerangan,  
Komunikasi dan Media Massa---  
19.1 Subsektor Politik---  
19.2 Subsektor Hubungan Luar Negeri ---  
19.3 Subsektor Penerangan, Komunikasi dan  
Media Massa---

20 Sektor Pertahanan dan Keamanan Rp56.958.197.907,00  
20.1 Subsektor Rakyat Terlatih dan  
Perlindungan Masyarakat---  
20.2 Subsektor TNI---  
20.3 Subsektor Kepolisian---  
20.4 Subsektor Pendukung Rp56.958.197.907,00

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Pembiayaan dalam negeri sebesar Rp 18.900.000.000.000,00 terdiri dari :

- a.Privatisasi---
- b.Penjualan aset program restrukturisasi perbankanRp18.900.000.000.000,00
- c.Penjualan obligasi dalam negeri---
- dikurangi dengan :
- d.Pembiayaan perbankan dalam negeri---

Pembiayaan luar negeri bersih sebesar Rp 10.195.669.541.708,00terdiri dari :

- a.Penarikan pinjaman luar negeri brutoRp 17.818.422.856.341,00
- Penarikan pinjaman programRp848.797.957.000,00
- Penarikan pinjaman proyekRp 16.969.624.899.341,00
- Dikurangi dengan :
- b.Pembayaran cicilan pokok hutang luar negeriRp7.622.753.314.633,00

Pasal 6

Dalam hal pendapatan negara belum cukup untuk mencukupi kebutuhan belanja Pemerintah pada suatu periode tertentu, kekurangannya dapat ditalangi dari dana Sisa Anggaran Lebih, yang akan dikembalikan setelah pendapatan negara dalam tahun anggaran berjalan mencukupi.

Pasal 7

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR4208

[Kasus Pengadaan yang Sampai Pengadilan](#)

[Workshop RPJMN IPTEK 2010-2014](#)

[Public Private Partnerships FORUM](#)

[Musrenbang Provinsi Papua Barat](#)

[Pengembangan Bambu Nasional Langkah Strategis, Enviromentally friendly & Alleviate Poverty.](#)

Comments

**Tinggalkan Komentar**

**Nama:**

**E-Mail:**

(Email anda tidak akan dilihat oleh publik)

**Komentar anda**

Please type the letters and numbers shown in the image.

Click the image to see another captcha.

---

**Kirim Komentar**